



# PENGARUH PENDIDIKAN MORAL TERHADAP PRILAKU SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 INDRAGIRI HILIR

Nurfadhilah Azura<sup>1</sup>, Deddy Yusuf Yudhyrta<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswi Prodi PAI STAI Auliurasyidin Tembilahan, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen STAI Auliurasyidin Tembilahan, Indonesia

## Abstrak

Permasalahan yang diteliti adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MIN 1 Indragiri Hilir.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri HILir. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Prilaku siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Populasi berjumlah 250 orang, yang menggunakan sampel berjumlah 71 orang. Teknik pengumpulan data adalah metode angket, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisa penelitian ini peneliti menggunakan rumus teknik regresi sederhana.

Hasil dari penelitian ini adalah  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  ( $21,30 \geq 3,98$ ). Dengan demikian,  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir. Pendidikan moral kepada siswa agar memiliki perilaku yang baik.

**Kata Kunci:** Pendidikan Moral, Prilaku Siswa, Pendidikan Kewarganegaraan

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Pendidikan berlangsung seumur hidup karena manusia selama hidup ia selalu mendapat pengaruh dari berbagai pihak. Segi lain lagi bahwa pendidikan ialah usaha menolong orang agar ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

<sup>1</sup>Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohan, dan Kalbu*

*Memanusiakan Manusia*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 39.

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>2</sup>

Pada prinsipnya pendidikan itu membawa dan membina mental seseorang itu semakin baik, dalam arti menjadikan seseorang itu lebih cerdas, lebih bermoral, tegasnya lebih maju daripada sebelumnya menerima pendidikan.<sup>3</sup>

Pendidikan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang kita kenal dengan Mata Pelajaran *civis* di Sekolah Dasar dan merupakan embrio dari *civic education* sebagai “*the Body of knowledge*”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pengetahuan (*the Body of knowledge*) di arahkan untuk membangun masyarakat demokrasi yang beradab.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Pendidikan Moral

Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia.<sup>5</sup> Seseorang dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dan sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai

dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat maka orang tersebut dikatakan tidak bermoral.

Penanaman pendidikan moral harus ditanamkan sedini mungkin kepada siswa untuk membentuk perilaku yang bermoral. Seseorang dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosial.<sup>6</sup> Perilaku setiap individu pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, perilaku individu pada umumnya didorong oleh keinginan untuk merealisasikan tujuan.<sup>7</sup>

Dalam klasifikasi perilaku manusia terdiri atas empat macam, yaitu:

- a. *Insting*, yaitu aktivitas yang hanya menuruti kodrat dan tidak melalui belajar.
- b. *Habits*, yaitu kebiasaan yang dihasilkan dari pelatihan atau aktivitas yang berulang-ulang.
- c. *Native behavior*, yaitu tingkah laku pembawaan, mengikuti mekanisme hereditas.
- d. *Acquired behavior*, yaitu tingkah laku yang dapat sebagai hasil dari belajar.<sup>8</sup>

Dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan erat antara reaksi-reaksi *behavioral* dengan stimulusnya. Maka perilaku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku. Perilaku dalam pandangan *Behaviorisme* dijelaskan melalui pengamatan yang

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 SISDIKNAS (SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL), (Bandung: Fokus Media, 2006), h. 2.

<sup>3</sup>Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h.18.

<sup>4</sup>Deddy Yusuf Yudhyarta, *Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, (Pekanbaru: UR Press, 2017), h. 3.

<sup>5</sup>Franz Magnis Suseno, *Etik Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 19.

<sup>6</sup>Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 133.

<sup>7</sup>H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 120.

<sup>8</sup>Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 107.

dapat diamati, bukan melalui proses mental adalah hasil belajar.<sup>9</sup>

Pendidikan moral merupakan dasar bagi sebuah pendidikan karakter. Moralitas terutama berbicara apakah aku sebagai manusia, merupakan manusia yang baik atau buruk. Moralitas melihat bagaimana manusia yang satu mesti memperlakukan manusia yang lain. Moralitas merupakan pemahaman nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seorang individu dan komunitas agar kebebasan dan keunikan masing-masing individu tidak dilanggar sehingga mereka semakin menghargai kemerdekaan masing-masing. Secara umum moralitas berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang atau hal-hal secara baik sehingga menjadi cara bertindak terutama bagi pribadi dan komunitas.<sup>10</sup>

Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral (imoral). Tetapi didalam dirinya terdapat potensi moral yang siap dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain (dengan orangtua, saudara, teman sebaya, atau guru), anak belajar memahami tentang perilaku yang mana yang baik, yang boleh dikerjakan dan

tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan.<sup>11</sup>

Adapun tahap-tahap perkembangan menurut Kohlberg sebagai berikut<sup>12</sup> :

a. Tingkat *Pra-Konvensional*. Pada tahap ini seseorang sangat tanggap terhadap aturan-aturan kebudayaan dan penilaian baik atau buruk, tetapi ia menafsirkan baik atau buruk ini dalam rangka maksimalisasi kenikmatan atau akibat-akibat fisik dari tindakannya (hukuman fisik, penghargaan, tukar-menukar kebaikan). Kecendrungan utamanya dalam interaksi dengan orang lain adalah menghindari hukuman atau mencapai maksimalisasi kenikmatan (*Hedonistic*). Tingkat ini dibagi 2 tahap:

Tahap 1: Orientasi Hukuman dan Kepatuhan

Pada tahap ini, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh akibat-akibat fisik yang akan dialami, sedangkan arti atau nilai manusiawi tidak diperhatikan. Menghindari hukuman dan kepatuhan terhadap penguasa dinilai baik pada dirinya.

Tahap 2: Orientasi Instrumentalistis

Pada tahap ini tindakan seseorang selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memperlakui orang lain. Hubungan antara manusia dipandang seperti hubungan dagang. Unsur-unsur keterbukaan, kesalingan dan tukar menukar merupakan prinsip-prinsip kesalingannya adalah, "Kamu

<sup>9</sup>Agus Suprijono, *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 17.

<sup>10</sup>Wisnu Giyono dan Tarto Sentono, *Jurnal Penelitian Vol. 10 Pelaksanaan Pendidikan Moral di Sekolah Dasar Kota Yogyakarta*, 2015.

<sup>11</sup>Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 258.

<sup>12</sup>*Op.cit.*, h. 29-31.

mencakar punggungku dan aku akan ganti mencakar punggungmu”.

- b. Tingkat *Konvensional*. Pada tahap ini seseorang menyadari dirinya sebagai individu di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsanya. Keluarga, masyarakat, bangsa dinilai memiliki kebenarannya sendiri, karena jika menyimpang dari kelompok ini akan terisolasi. Maka itu, kecenderungan orang yang pada tahap ini adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan mengidentifikasi dirinya terhadap kelompok sosialnya. Kalau pada tingkat *Pra-konvensional* perasaan dominan adalah takut, pada tingkat ini perasaan dominan adalah malu. Tingkat ini terdiri dari 2 tahap:

Tahap 3: Orientasi Kerukunan atau Orientasi *Good Boy-Nice Girl*

Pada tahap ini orang berpandangan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau menolong orang-orang lain serta diakui oleh orang-orang lain. Orang cenderung bertindak menurut harapan-harapan lingkungan sosialnya, hingga mendapat pengakuan sebagai orang baik. tujuan utamanya, demi hubungan sosial yang memuaskan, maka ia pun harus berperan sesuai dengan harapan-harapan keluarga, masyarakat atau bangsanya.

Tahap 4: Orientasi Ketertiban Masyarakat

Pada tahap ini tindakan seseorang didorong oleh keinginannya untuk menjaga tertib legal. Orientasi seseorang adalah otoritas, peraturan-peraturan yang ketat dan ketertiban sosial. tingkah laku yang baik adalah

memenuhi kewajiban, mematuhi hukum, menghormati otoritas, dan menjaga ketertiban sosial merupakan tindakan moral yang baik pada dirinya.

- c. Tingkat *Pasca-Konvensional*. Pada tahap ini orang bertindak sebagai subyek hukum dengan mengatasi hukum yang ada. Orang pada tahap ini bahwa hukum merupakan kontrak sosial demi ketertiban dan kesejahteraan umum, maka jika hukum tidak sesuai dengan martabat manusia, hukum dapat dirumuskan kembali. Perasaan yang muncul pada tahap ini adalah rasa bersalah dan yang menjadi ukuran keputusan moral adalah hati nurani. Tingkata ini terdiri dari 2 tahap:

Tahap 5: Orientasi Kontrak Sosial

Tindakan yang benar pada tahap ini cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum.

Tahap 6: Orientasi Prinsip Etis *Universal*

Pada tahap ini orang tidak hanya memandang dirinya sebagai subyek hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang harus dihormati.

Pendidikan moral dapat disampaikan dengan metode langsung atau tidak langsung. Metode langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai baik, sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya dengan memusatkan perhatian secara langsung pada ajaran tersebut, lewat mendiskusikan, mengilustrasikan, menghafalkan, dan mengucapkannya. Dalam pendidikan moral anak disampaikan melalui penanaman pengertian tingkah

laku yang benar atau salah, atau baik buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Disamping itu yang paling penting dalam pendidikan moral ini adalah keteladanan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya dalam melakukan nilai-nilai moral.<sup>13</sup>

Pendidikan moral dengan metode tidak langsung dimulai dengan menentukan perilaku yang memungkinkan perilaku baik dapat dipraktekkan. Keseluruhan pengalaman di sekolah dimanfaatkan untuk pengembangan perilaku yang baik.<sup>14</sup>

Adapun strategi dalam pendidikan moral adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

- a. Pendidikan moral dapat dilakukan dengan menetapkan pelaksanaan pendidikan agama, karena pada nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik.
- b. Pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus diubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama.
- c. Pendidikan moral dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat *integrated*, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan.
- d. Pendidikan moral harus melibatkan guru.
- e. Pendidikan moral harus didukung oleh kemampuan, kerja sama yang kompak dan usaha sungguh-sungguh dari keluarga atau rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

f. Pendidikan moral harus menggunakan seluruh kesempatan, berbagai sarana termasuk teknologi modern. Kesempatan berkreasi, pameran, kunjungan berkemah, dan sebagainya harus digunakan sebagai peluang untuk membina moral. Untuk membentuk manusia bermoral maka dibutuhkan pendidikan kewarganegaraan dimana pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia.

Karakteristik manusia yang memiliki pendidikan moral adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Setia, jujur dan dapat dipercaya.
- b. Baik hati, penyayang, empati, peka, dan toleran.
- c. Pekerja keras, tanggung jawab, dan memiliki disiplin diri.
- d. Mandiri, mampu menghadapi tekanan kelompok.
- e. Murah hati, memberi, dan tidak mementingkan diri sendiri.
- f. Memperhatikan dan memiliki penghargaan tentang otoritas yang sah, peraturan, dan hukum.
- g. Menghargai diri sendiri dan orang lain.
- h. Menghargai kehidupan, kepemilikan, alam, orang yang lebih tua dan orang tua.
- i. Santun, dan memiliki adab kesopanan.
- j. Adil dalam pekerjaan dan permainan.
- k. Murah hati dan pemaaf, mampu memahami bahwa balas dendam tidak ada gunanya.

<sup>13</sup>Syamsu Yusuf LN, *Psikologi perkembangan Anak dan Remaja*, *Op.cit.*, h. 134.

<sup>14</sup>Darmayati Zachdi, *Op.cit.*, h. 5.

<sup>15</sup>Abuddin Nata, *Op.cit.*, h. 214-216.

<sup>16</sup>*Op.cit.*, h.5.

l. Selalu ingin melayani, memberi sumbangan pada keluarga, masyarakat, negara, agama, dan sekolah.

m. Pemberani.

n. Tenang, damai dan tentram.

### 3. Pengertian Prilaku Siswa

Prilaku yang ada pada individu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi timbul sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu tersebut. Prilaku merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang ada, sedangkan respon merupakan fungsi yang tergantung pada stimulus dan individu. Prilaku merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenyainya.<sup>17</sup>

Komponen prilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek.<sup>18</sup>

Menurut pandangan *Behaviorisme*, prilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dapat dilihat secara langsung.<sup>19</sup> Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa sesuai dengan nilai-nilai norma ataupun nilai yang ada dalam masyarakat yang sudah ada sebelumnya dalam suatu kelompok sosial masyarakat.

Siswa adalah anak didik yang mandiri yaitu dengan mempunyai kedaulatan atas dirinya sendiri. Dikatakan demikian karena siswa yang

mempunyai latar belakang yang berbeda satu sama lainnya.<sup>20</sup>

Pada dasarnya siswa adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya siswa, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Tanpa adanya siswa guru tidak akan mungkin mengajar. Sehingga siswa adalah komponen yang terpenting dalam hubungan proses belajar mengajar.<sup>21</sup>

Sehingga siswa diperlukan dalam proses pendidikan moral. Siswa sebagai subjek melaksanakan pendidikan moral yang telah diberikan dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar memiliki prilaku baik yang sesuai dengan moral.

Prilaku siswa sebagian besar adalah prilaku yang dibentuk, prilaku yang dipelajari. Dalam klasifikasi prilaku siswa ada beberapa para ahli yang mengemukakan teorinya mengenai prilaku yang dilakukan oleh siswa.

a. Klasifikasi Prilaku Menurut Gagne. Gagne dalam teorinya tentang kondisi-kondisi belajar mengelompokkan prilaku kedalam delapan kelas dari tipe belajar sederhana sampai pada belajar yang kompleks adalah sebagai berikut<sup>22</sup> :

- 1) *Signal Learning*. Dalam jenis belajar ini individu memperoleh respon terkondisi terhadap signal tertentu.
- 2) *Stimulus Response Learning*. Belajar S-R dapat digunakan untuk memperoleh keterampilan

<sup>17</sup>Bimo Walgito, *Loc.cit*, h.11.

<sup>18</sup>Inge Hutagalung, *Pengembangan Kepribadian Tinjauan Praktis Menuju Pribadi Positif*, (Jakarta: PT. Macan Jaya Cemerlang, 2007), h. 53.

<sup>19</sup>Agus Suprijono, *loc.cit*, h. 17.

<sup>20</sup>Edi Soegito dan D. Yuliana Hurani, *Loc.cit.*, h. 24.

<sup>21</sup>Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 99-100.

<sup>22</sup>Oemar Hamalik, *Ibid*, h. 77-78.

- verbal dan gerakan fisik dengan cara menghubungkan stimulus dengan respon.
- 3) *Chaining*. Dalam jenis belajar ini seseorang merangkaikan bersama-sama S-R yang telah dipelajari sebelumnya. Rangkaian itu mungkin melibatkan reaksi-reaksi fisik.
  - 4) *Verbal Association*. Asosiasi verbal yang tersederhana adalah kegiatan penanaman suatu objek yang melibatkan suatu rantai dari dua rangkaian.
  - 5) *Discrimination Learning*. Dalam tipe belajar ini siswa harus mempelajari respon-respon yang berbeda-beda bagi stimulus yang mungkin membingungkan. Siswa belajar membedakan rantai motorik dan rantai verbal yang diperolehnya.
  - 6) Belajar Konsep (*Concept Learning*). Dalam mempelajari konsep kita merespons stimulus yang karakteristiknya abstrak, misalnya warna, bentuk. Posisi, dan nomor sebagai lawan dari sifat fisik konkret.
  - 7) *Rule Learning*. Aturan (*rule*) adalah rangkaian konsep. Dalam mempelajari aturan itu kita menghubungkan dua atau lebih konsep. Kita harus mempelajari dua atau lebih sebelum mempelajari keteraturan yang lebih tinggi. Dengan mempelajari komponen konsep-konsep dan aturan, guru dapat menggunakan pengajaran verbal dalam memimpin siswa untuk meletakkan aturan-aturan bersama-sama.
  - 8) *Problem Solving*. Dalam perangkat peristiwa yang disebut pemecahan masalah siswa menggunakan aturan-aturan untuk mencapai beberapa tujuan. Bila tujuan telah tercapai, siswa telah mempelajari sesuatu lebih kemudian mampu melaksanakan perilaku baru yang menggunakan pengetahuan yang baru pula. Pemecahan masalah menurut peristiwa internal yang biasa disebut berfikir.
- b. Teori *Insting*<sup>23</sup>. Menurut Mc. Dougall perilaku itu disebabkan karena *insting*. *Insting* merupakan perilaku yang *innate*, perilaku bawaan, dan *insting* akan mengalami perubahan karena pengalaman.
  - c. Teori Dorongan (*Drive Theory*). Teori ini bertolak pada pandangan bahwa organisme (siswa) itu mempunyai dorongan-dorongan atau *drive* tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Bila siswa berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut.
  - d. Teori Insentif (*Incentive Theory*). Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme (siswa) itu disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Insentif juga disebut sebagai *reinforcement* ada yang positif dan ada yang negatif. *Reinforcement* yang

<sup>23</sup>Bimo Walgito, *Op.cit*, h. 19-21.

positif adalah berkaitan dengan hadiah, sedangkan *reinforcement* yang negatif berkaitan dengan hukuman. *Reinforcement* positif akan mendorong siswa dalam berbuat, sedangkan *reinforcement* yang negatif berkaitan dengan hukuman. *Reinforcement* positif akan mendorong siswa dalam berbuat, sedangkan *reinforcement* yang negatif akan dapat menghambat dalam siswa dalam berperilaku. Ini berarti perilaku timbul karena adanya insentif atau *reinforcement*.

- e. Teori Atribusi. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider yang ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku seseorang. Apakah perilaku disebabkan oleh disposisi (misalnya motif, sikap, dan sebagainya) atau disebabkan oleh keadaan eksternal.
- f. Teori Kognitif. Apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Dengan kemampuan memilih ini berarti kemampuan berfikir seseorang akan dapat melihat apa yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam seseorang (siswa) bertindak.

Dalam pembentukan perilaku siswa, ada beberapa cara yang dapat digunakan sebagai berikut<sup>24</sup> :

- a. Cara pembentukan perilaku dengan kebiasaan (*kondisioning*). Salah satu

cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan *kondisioning* atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti diharapkan, akhirnya terbentuklah perilaku tersebut. Misalnya anak dibiasakan bangun pagi, atau menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu oleh orang lain, membiasakan diri untuk datang tidak terlambat di sekolah dan sebagainya.

- b. Pembentukan perilaku dengan pengertian. Di samping pembentukan perilaku melalui kebiasaan (*kondisioning*), pembentukan perilaku dapat dibentuk melalui pengertian. Misalnya memberikan pengertian kepada anak pentingnya mengikuti upacara bendera.
- c. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Di samping pembentukan perilaku seperti di atas, pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan model atau contoh. Guru sebagai pendidik sebagai model atau contoh yang akan ditiru oleh siswa harus memberikan contoh yang baik sehingga siswa dapat berperilaku yang baik sesuai dengan model atau contoh gurunya.

Pembentukan perilaku siswa dapat dibentuk melalui tata tertib sekolah. Menurut Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1974, No. 14/U/1974, tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggaran

<sup>24</sup>Bimo Walgito, *Loc.cit.*, h. 11.

nya. Pada dasarnya tata tertib untuk siswa adalah sebagai berikut<sup>25</sup> :

- a. Tugas dan kewajiban dalam kegiatan intra sekolah.
  - 1) Siswa harus datang di sekolah sebelum pelajaran dimulai.
  - 2) Siswa harus sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal sebelum pelajaran itu dimulai.
  - 3) Siswa tidak dibenarkan tinggal di dalam kelas pada saat jam istirahat kecuali jika keadaan tidak mengizinkan misalnya hujan.
  - 4) Siswa boleh pulang jika pelajaran telah selesai.
  - 5) Siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan sekolah.
  - 6) Siswa wajib berpakaian sesuai dengan yang ditetapkan oleh sekolah, dan
  - 7) Siswa juga harus memperhatikan kegiatan ekstrakurikuler seperti: kepramukaan, kesenian, palang merah remaja, dan sebagainya.
- b. Larangan-larangan yang harus diperhatikan:
  - 1) Meninggalkan sekolah / jam pelajaran tanpa izin dari kepala sekolah atau guru yang bersangkutan.
  - 2) Merokok di sekolah.
  - 3) Berpakaian tidak senonoh atau bersolek yang berlebihan, dan
  - 4) Kegiatan yang mengganggu jalannya pelajaran.
- c. Sanksi bagi siswa dapat berupa:
  - 1) Peringatan lisan secara langsung.
  - 2) Peringatan tertulis dengan tembusan orang tua.
  - 3) Dikeluarkan sementara, dan
  - 4) Dikeluarkan dari sekolah.

Tata tertib sekolah membentuk perilaku siswa yaitu<sup>26</sup> :

- a. Lima belas menit sebelum pelajaran dimulai, semua siswa harus sudah ada di sekolah.
- b. Siswa yang terlambat datang harus melapor kepada guru piket/guru kelas.
- c. Pada waktu proses pelajaran berlangsung siswa tidak diperkenankan keluar masuk kelas kecuali telah mendapat izin dari guru kelas.
- d. Siswa yang berhalangan mengikuti pelajaran apapun alasannya, orang tua/walinya harus memberitahukan secara tertulis atau lisan ke sekolah.
- e. Siswa wajib berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yaitu:
  - 1) Hari Senin dan Selasa berpakaian seragam hitam – putih.
  - 2) Hari Rabu berpakaian seragam batik.
  - 3) Hari Kamis berpakaian seragam pramuka.
  - 4) Hari Jum'at berpakaian seragam muslim.
  - 5) Hari sabtu berpakaian olahraga.
- f. Siswa tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan disekolah.
- g. Siswa harus berpakaian yang rapi, sopan dan beradab baik disekolah maupun diluar sekolah.

<sup>25</sup>B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004), h. 81-83.

<sup>26</sup>Abdul Rahman, S. Ag (Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Indragiri Hilir).

- h. Setiap siswa wajib bersifat hormat kepada kepala sekolah, guru karyawan serta penjaga sekolah.
- i. Setiap siswa wajib mengikuti setiap kegiatan sekolah seperti upacara bendera, senam, pramuka, praktek ibadah, tartil dan praktek olahraga.

#### 4. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan bukan sesuatu yang baru dalam sejarah pendidikan nasional di Indonesia. Beragam model dan sebutan bagi Pendidikan Kewarganegaraan dengan berbagai komponennya telah banyak dilakukan pemerintah Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pengetahuan diarahkan untuk membangun masyarakat demokrasi yang beradab. Secara normatif, Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh dasar hukum yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>28</sup>

Menurut Azyumardi Azra bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan yang cakupannya lebih luas dari Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan HAM, karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, yakni (a) pengetahuan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, (b) pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam

pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, dan (c) pengetahuan tentang proses seperti warga kenegaraan aktif. Refleksi kritis, pendidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antar budaya dan keselarasan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.<sup>29</sup>

Dalam buku pendidikan Kewarganegaraan, Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : (a) *Civic education* adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah; (b) *Civic education* meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis; (c) dalam *Civic education* termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara. Dengan kata lain, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan yang

<sup>27</sup>A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op.cit.*, h. 5.

<sup>28</sup>Deddy Yusuf Yudhyarta, *Loc.cit.*, h.3.

<sup>29</sup>Deddy Yusuf Yudhyarta, *Op.cit.*, h. 9.

berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen *Civic education* di atas melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, serta humanis dalam lingkungan yang demokratis.<sup>30</sup>

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain : (a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa, (c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, kebersamaan, toleransi, dan tanggung jawab.<sup>31</sup>

## B. METODOLOGI

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas tinggi yaitu IV, kelas V, dan kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)1Indragiri Hilir. Objek penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) adalah pendidikan moral dan variabel terikat(Y) adalah perilaku siswa. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 250 siswa yang terdiri dari 8 kelas secara rombongan

Sampel dalam penelitian ini di ambil dari kelas IV sebanyak 94 siswa/siswi,

kelas V sebanyak 105 siswa/siswi, dan kelas VI sebanyak 51 siswa/siswi.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = presisi yang ditetapkan

Dalam penelitian ini menggunakan sampel 10%.<sup>32</sup>

n = 250

$$n = \frac{250}{250 \cdot (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{250}{250 \cdot (0,01) + 1} = \frac{250}{2,5 + 1}$$

n =  $\frac{250}{3,5} = 71,42$  dibulatkan menjadi

71 sampel

Setelah diketahui jumlah sampel secara keseluruhan 71 siswa, maka langkah selanjutnya adalah mengalokasikan atau menyebarkan satuan-satuan sampling ini kepada setiap kelas dengan menggunakan pengambilan sampel secara *proporsional random sampling* (pengambilan sampel bertingkat) memakai rumus alokasi proposional dengan rumus:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Dimana

n = jumlah sampel menurut stratum

n<sub>i</sub> = jumlah sampel seluruhnya

N<sub>i</sub> = jumlah populasi menurut stratum

N = jumlah populasi seluruhnya

<sup>30</sup>Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Op.cit.*, h.7.

<sup>31</sup>*Op.cit.*, h. 9-10.

<sup>32</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Guru-Karyawan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h., 65.

Kelas IV =  $94:250 \times 71 = 27$  siswa

Kelas V =  $105:250 \times 71 = 30$  siswa

Kelas VI =  $51:250 \times 71 = 14$  siswa

Jumlah = 250 siswa = 71 siswa

Maka setiap pengambilan sampel pada kelas IV adalah 27 siswa/siswi, kelas V adalah 30 siswa/siswi, dan kelas VI adalah 14 siswa/siswi.

Adapun teknik penelitian data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Angket, wawancara dan dokumentasi. Analisa merupakan proses pengorganisasian dalam mengutamakan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Yang digunakan sebagai variabel bebas (x) adalah pendidikan Moral sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah perilaku siswa.

Untuk memperoleh persentase pendidikan moral dan perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MIN 1 Indragiri Hilir, peneliti menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket: P = Persentase  
F = Frekuensi Persentase  
N = Jumlah Frekuensi<sup>33</sup>

Dalam hal ini penelitian ini menggunakan rumus regresi sederhana sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = (di baca Y topi), subjek dalam variabel terikat (variabel Y) yang diproyeksikan

a = nilai konstan harga Y jika X = 0

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan peningkatan atau penurunan nilai variabel Y yang didasarkan pada variabel X.

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \quad a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

Langkah 1. Membuat  $H_a$  dan  $H_o$  dalam bentuk kalimat

Langkah 2. Membuat  $H_a$  dan  $H_o$  dalam bentuk statistik

Langkah 3. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik

Langkah 4. Memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus:

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

langkah 5. Mencari jumlah Kuadrat Regresi ( $JK_{Reg[a]}$ ) dengan rumus:

$$JK_{Reg[a]} = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

langkah 6. Mencari jumlah Kuadrat Regresi ( $JK_{Reg[b/a]}$ ) dengan rumus:

$$JK_{Reg[b/a]} = b \left\{ \sum X.Y - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n} \right\}$$

langkah 7. Mencari jumlah Residu ( $JK_{Res}$ ) dengan rumus:

$$JK_{Res} = \sum Y^2 - JK_{Reg[b/a]} - JK_{Reg(a)}$$

Langkah 8. Mencari rata-rata jumlah Kuadrat

Regresi ( $RJK_{Reg(a)}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{Reg[a]} = JK_{Reg[a]}$$

Langkah 9. Mencari rata-rata jumlah Kuadrat Regresi ( $RJK_{Reg[b/a]}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{Reg[b/a]} = JK_{Reg[b/a]}$$

<sup>33</sup>Anas Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 43.

Langkah 10. Mencari rata-rata jumlah Kuadrat Residu ( $RJK_{Reg|b/a}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{Res} = \frac{JK_{Res}}{n-2}$$

Langkah 11. Menguji Signifikansi dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{Reg|b/a}}{RJK_{Res}}$$

Kaidah pengujian signifikansi:

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$  artinya signifikan dan

$F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka terima  $H_0$  artinya tidak signifikan

Langkah 12. Membuat kesimpulan Kriteria:

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima.<sup>34</sup>

## B. PEMBAHASAN

Teknik angket digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pendidikan moral dan perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir. Angket ini berisi 20 pertanyaan dengan 4 alternatif jawaban yang disebarkan kepada 71 siswa/siswi MIN 1 Indragiri Hilir pada tanggal 18 Agustus 2017 sampai 22 Agustus 2017 dan semuanya dikembalikan responden.

Dari hasil rekapitulasi, maka data pendidikan moral pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MIN 1 Indragiri Hilir dianalisis dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket: P = Persentase

F = Frekuensi Persentase

N = Jumlah Frekuensi (jumlah responden x jumlah pertanyaan angket). Jadi, nilai  $N = 71 \times 10 = 710$

Sehingga dapat ditentukan persentase dari masing-masing alternatif jawaban yang disajikan sebagai berikut:

Alternatif jawaban A

$$= \frac{186}{710} \times 100\% = 26,2\%$$

Alternatif jawaban B

$$= \frac{277}{710} \times 100\% = 39,01\%$$

Alternatif jawaban C

$$= \frac{176}{710} \times 100\% = 24,79\%$$

Alternatif jawaban D

$$= \frac{71}{710} \times 100\% = 10\%$$

Sedangkan untuk mendapatkan persentase akhir, maka masing-masing alternatif jawaban diberi bobot sebagai berikut:

Alternatif jawaban A  $186 \times 3 = 558$

Alternatif jawaban B  $277 \times 2 = 554$

Alternatif jawaban C  $176 \times 1 = 176$

Alternatif jawaban D  $71 \times 0 = 0$

Dari bobot alternatif jawaban di atas, maka diperoleh nilai  $F = 558 + 554 + 176 + 0 = 1288$ . Sedangkan nilai N diperoleh dari jumlah item pertanyaan x skor tertinggi alternatif jawaban x jumlah responden, sehingga diperoleh hasil  $N = 10 \times 3 \times 71 = 2130$ . Jadi persentase akhir dari Pendidikan Moral pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MIN 1 Indragiri Hilir adalah:

P =

$$\frac{F}{N} \times 100\% = \frac{1288}{2130} \times 100\% = \frac{128800}{2130} = 60,47\%$$

Berdasarkan persentase di atas dan

<sup>34</sup>Op.cit., h. 148-149.

disesuaikan dengan klasifikasi persentase, maka Pendidikan Moral di MIN 1 Indragiri Hilir dikategorikan baik, hal ini terlihat dari persentase akhir yaitu 60,47%.

Dari hasil rekapitulasi, maka data hasil dapat dianalisis dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket: P = Persentase

F = Frekuensi Persentase

N = jumlah Frekuensi (jumlah responden x jumlah pertanyaan angket). Jadi, nilai N = 71 x 10 = 710

Sehingga dapat ditentukan persentase dari masing-masing alternatif jawaban yang disajikan sebagai berikut:

Alternatif jawaban A

$$= \frac{264}{710} \times 100\% = 37,2\%$$

Alternatif jawaban B

$$= \frac{216}{710} \times 100\% = 30,42\%$$

Alternatif jawaban C

$$= \frac{113}{710} \times 100\% = 15,91\%$$

Alternatif jawaban D

$$= \frac{117}{710} \times 100\% = 16,47\%$$

Sedangkan untuk mendapatkan persentase akhir, maka masing-masing alternatif jawaban diberi bobot sebagai berikut:

Alternatif jawaban A  $264 \times 3 = 792$

Alternatif jawaban B  $216 \times 2 = 432$

Alternatif jawaban C  $113 \times 1 = 113$

Alternatif jawaban D  $117 \times 0 = 0$

Dari bobot alternatif jawaban di atas, maka diperoleh nilai  $F = 792 + 432 + 113 + 0 = 1337$ . Sedangkan nilai N diperoleh dari jumlah item pertanyaan x

skor tertinggi alternatif jawaban x jumlah responden, sehingga diperoleh hasil  $N = 10 \times 3 \times 71 = 2130$ . Jadi persentase akhir dari Prilaku Siswa adalah:

P =

$$\frac{F}{N} \times 100\% = \frac{1337}{2130} \times 100\% = \frac{133700}{2130} = 62,77\%$$

Berdasarkan persentase di atas dan disesuaikan dengan klasifikasi persentase, maka prilaku siswa di MIN 1 Indragiri Hilir dikategorikan baik, hal ini terlihat dari persentase akhir yaitu 62,77%.

Untuk melakukan pembahasan hasil angket yang telah disajikan diatas peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1. Membuat  $H_a$  dan  $H_o$  dalam bentuk kalimat sebagai berikut:

$H_o$ : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan moral terhadap prilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MIN 1 Indragiri Hilir.

$H_a$ : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan moral terhadap prilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MIN 1 Indragiri Hilir.

Langkah 2. Membuat  $H_a$  dan  $H_o$  dalam bentuk statistik

$H_a: r \neq 0$

$H_o: r = 0$

Langkah 3. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistic

$\sum X =$	$\sum Y =$	$\sum X^2 =$	$\sum Y^2 =$	$\sum XY =$
1297	1338	24497	26172	24868

Langkah 4. Menentukan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus

Menghitung rumus b dan rumus a

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum Y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{71(24868) - (1297)(1338)}{71(24497) - (1297)^2}$$

$$= \frac{1765628 - 1735386}{1739287 - 1682209}$$

$$= \frac{30242}{57078} = 0,53$$

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(1338)(24497) - (1297)(24868)}{71(24497) - (1297)^2} =$$

$$\frac{32776986 - 32253796}{1739287 - 1682209} = \frac{523190}{57078} = 9,17$$

Memasukkan nilai a dan b kedalam persamaan regresi sederhana:

$$Y = a + b$$

$$Y = 9,17 + 0,53$$

Langkah 5. Mencari jumlah Kuadrat Regresi ( $JK_{Reg[a]}$ ) dengan rumus:

$$JK_{Reg[a]} = \frac{(\sum Y)^2}{n} = \frac{(1338)^2}{71} = \frac{1790244}{71} = 25214,70$$

Langkah 6. Mencari jumlah Kuadrat Regresi ( $JK_{Reg[b/a]}$ ) dengan rumus :

$$JK_{Reg[b/a]} = b \left\{ \sum X.Y - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{n} \right\} =$$

$$0,53 \left\{ 24868 - \frac{(1297)(1338)}{71} \right\}$$

$$= 0,53 \left\{ 24868 - \frac{1735386}{71} \right\}$$

$$= 0,53 \{ 24868 - 24442,05 \} =$$

$$0,53.425,95 = 225,75$$

Langkah 7. Mencari jumlah residu ( $JK_{Res}$ ) dengan rumus:

$$JK_{Res} = \sum Y^2 - JK_{Reg[b/a]} - JK_{Reg(a)}$$

$$JK_{Res} = 26172 - 225,75 - 25214,70$$

$$= 731,55$$

Langkah 8. Mencari rata-rata jumlah Kuadrat Regresi ( $RJK_{Reg(a)}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{Reg[a]} = JK_{Reg[a]}$$

$$RJK_{Reg[a]} = 25214,70$$

Langkah 9. Mencari rata-rata jumlah Kuadrat Regresi ( $RJK_{Reg[b/a]}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{Reg[b/a]} = JK_{Reg[b/a]}$$

$$RJK_{Reg[b/a]} = 225,75$$

Langkah 10. Mencari rata-rata jumlah Kuadrat Residu ( $RJK_{Reg[b/a]}$ ) dengan rumus:

$$RJK_{Res} = \frac{JK_{Res}}{n-2}$$

$$RJK_{Res} = \frac{731,55}{71-2} = \frac{731,55}{69} = 10,60$$

Langkah 11. Menguji Signifikansi dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{RJK_{Reg[b/a]}}{RJK_{Res}}$$

$$F_{hitung} = \frac{225,75}{10,60} = 21,30$$

Langkah 12. Membuat kesimpulan Kaidah pengujian signifikansi:

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$  artinya signifikan dan

$F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka terima  $H_0$  artinya tidak signifikan

$$\alpha \text{ taraf kepercayaan} = 0,05$$

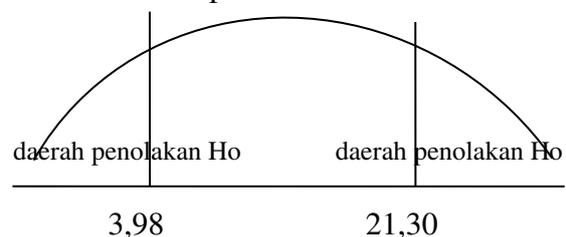
$$F_{tabel} = F_{(1-\alpha)(dk_{Reg[b/a]}, (dk_{Res)})} = F_{(0,95)(1,69)} = 3,98$$

Ternyata ( $F_{hitung}$ ) > ( $F_{tabel}$ ) maka tolak  $H_0$  artinya signifikan

$$\alpha = 0,05$$

$$\alpha = 0,05$$

Daerah penerimaan  $H_0$



Karena  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  atau  $21,30 \geq 3,98$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendidikan Moral terhadap Prilaku Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti menemukan bahwa pengaruh pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MIN 1 Indragiri Hilir terdapat pengaruhnya karena  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  atau  $21,30 \geq 3,98$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir.

Hubungan pendidikan moral dengan perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah saling berhubungan. Pendidikan kewarganegaraan tentang pendidikan moral dapat membentuk perilaku siswa untuk berperilaku baik, seperti berbicara dengan sopan, tidak mengganggu teman, perilaku taat kepada guru, memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dapat membedakan perilaku baik dan perilaku buruk serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memperkuat penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan guru kelas dari kelas IV sampai kelas VI. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 24 Agustus 2017. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa responden dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagaimana pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

Jawaban: Tentu sangat membantu sekali serta berhubungan dengan K.13. mengajarkan bagaimana jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, kerja sama, dan lain sebagainya. Tentu pengaruhnya sangat besar sekali. Dengan adanya pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang pendidikan moral itu justru mengurangi kecenderungan anak untuk berperilaku yang tidak baik dan mengembangkan potensi-potensi anak, tanggung jawabnya akan meningkat, disiplinnya akan meningkat, bahkan kita mengharap kan hal itu membudaya<sup>35</sup>.

Jawaban: Alhamdulillah sudah bagus, tetapi hanya beberapa orang yang berbicara tidak sopan, mengganggu temannya.<sup>36</sup>

b. Apakah seluruh siswa sudah menerapkan pendidikan moral?

Jawaban: Ya, karena selama ini siswa belum ada kita jumpai siswa-siswa yang melakukan tindakan amoral. Di sekolah ini anak-anaknya sangat bermoral.<sup>37</sup>

Jawaban: Alhamdulillah, sudah bagus, tetapi hanya beberapa orang yang berbicara tidak sopan, mengganggu temannya.<sup>38</sup>

c. Bagaimana cara sekolah agar pendidikan moral terlaksana dengan baik?

Jawaban: Pertama menerapkan K.13, dengan menerapkan K.13 kita dapat mengamati setiap saat kegiatan siswa seluruh aspek dapat kita lakukan

<sup>35</sup>Ibnu Qasir, S.Pd.I. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 24 Agustus 2017.

<sup>36</sup>Arianida, S.Pd.I Wawancara ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 24 Agustus 2017.

<sup>37</sup>Op.cit

<sup>38</sup>Op.cit

penilaian. Seperti sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Kedua, mengamati siswa setiap saat setiap waktu dengan cara dengan menggunakan format penilaian sikap.<sup>39</sup>

Jawaban: *Alhamdulillah*, siswa sudah menerapkan pendidikan moral<sup>40</sup>.

- d. Bagaimana cara pembentukan perilaku siswa?

Jawaban: Dengan cara melakukan pembiasaan. Seperti siswa dibiasakan untuk disiplin, mengerjakan tugas dengan baik, dan ketika sholat mereka sholat.<sup>41</sup>

Jawaban: mengajarkan kepada siswa agar bersikap baik dengan temannya, berbicara dengan sopan dan kata-kata yang baik, mengajarkan cara bermain dengan teman, dan lain-lain.<sup>42</sup>

- e. Apa kendala dalam menerapkan pendidikan moral terhadap perilaku siswa?

Jawaban: Tidak ada kendala, karena buku, fasilitas, dan kemauan yang kuat untuk membentuk perilaku siswa yang baik serta orangtua juga memberikan dukungan.<sup>43</sup>

Jawaban: Tidak ada kendala, semua siswa menerapkannya<sup>44</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti menemukan bahwa:

Pengaruh pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir terdapat pengaruh karena pendidikan moral dapat membentuk perilaku siswa sehingga siswa dapat berperilaku baik seperti memiliki rasa tanggung jawab yang meningkat, siswa membiasakan untuk disiplin, mengerjakan tugas dengan baik, berbicara dengan sopan, dan bersikap baik dengan temannya.

Pengaruh pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir terdapat pengaruh karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $21,30 > 3,98$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan moral terhadap perilaku siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir.

#### REFERENSI

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abuddin Nata, 2012, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Agus Suprijono, 2012, *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Tafsir, 2012, *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohan, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

<sup>39</sup>Op.cit

<sup>40</sup>Op.cit

<sup>41</sup>Op.cit

<sup>42</sup>Op.cit

<sup>43</sup>Op.cit

<sup>44</sup>Op.cit

- Anas Sudjiono, 2008, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- B. Suryosubroto, 2004, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bimo Walgito, 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Burhanuddin Salam, 2000, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C. Asri Budiningsih, 2013, *Pembelajaran Moral*, Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Darmayati Zuchadi, 2008, *Humanisasi Pendidikan: Menentukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Deddy Yusuf Yudhyarta, 2013, *Pendidikan Pancasila*, Tembilahan: Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Sekolah Tinggi Agama Islam.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Pentingnya Pendidikan Kewarga negaraan Di Perguruan Tinggi*, Pekanbaru: UR Press.
- Desmita, 2012, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Edi Soegioto dan D. Yuliana Hurani, 2003, *Kemampuan Dasar Mengajar*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Elly M. Setiadi, 2005, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Franz Magnis Suseno, 1987, *Etik Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan Basri, 2009, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Pustaka Setia.
- H.B. Siswanto, 2011, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Inge Hutagalung, 2007, *Pengembangan Kepribadian Tinjauan Praktis Menuju Pribadi Positif*, Jakarta: PT. Macan Jaya Cemerlang.
- Jalaluddin, 2002, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, 2012, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Oemar Hamalik, 2011, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Riduwan, 2011, *Belajar Mudah Penelitian Guru-Karyawan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syamsu Yusuf, 2009, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Wahyu MS dan Muhammad MS, 2000, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Wiwit Wahyuning, 2003, *Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak*, Jakarta: Gramedia.
- Wisnu Giyono dan Tarto Sentono, *Jurnal Penelitian Vol. 10 Pelaksanaan Pendidikan Moral di Sekolah Dasar Kota Yogyakarta*, 2015.